

**KINERJA SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

M.ILHAM AKBAR  
NPP. 31.0229

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan*  
email : [milhamakbar14@gmail.com](mailto:milhamakbar14@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Nurhadi,S.Sos,M.A.P

**ABSTRACT**

**Background (GAP):** *The success of an organization is measured through performance achievements, especially in the context of public services for government organizations. Problems still arise when government organizations do not achieve their performance targets, as happened at the Secretariat of the Regional People's Representative Council for general affairs and finance in Lahat Regency. The level of performance of the DPRD Secretariat for general and financial affairs, whether good or bad, has a significant impact on the overall performance of the organization. Objective:* *This research aims to understand, evaluate, and explain the performance of the General and Financial Section of the Regional People's Representative Council Secretariat in Lahat Regency, South Sumatra Province, the factors that influence organizational performance, and steps to improve the organization's performance. Method:* *This research utilizes qualitative descriptive methods. Researchers determined informants using the purposive sampling technique. Data sources come from individuals, documents, and places. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, which are then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on the results of the analysis. Results/Findings:* *The results of the research show that the performance of the Regional People's Representative Council Secretariat for general and financial affairs in Lahat Regency, South Sumatra Province is considered satisfactory in the aspects of responsiveness and accountability. However, there is still a need to improve performance in several aspects such as productivity, service quality, and responsibility. Factors that influence organizational performance, such as Human Resources and work motivation, as well as facilities, need to be improved in order to improve the overall performance of the organization. Conclusion:* *The Secretariat of the Regional People's Representative Council, Lahat Regency's general and financial division, has made various efforts to improve organizational performance.*

**Keywords:** *Organization, Performance*

**ABSTRAK**

**Latar Belakang (GAP):** *Keberhasilan organisasi diukur melalui pencapaian kinerja, terutama dalam konteks pelayanan publik bagi organisasi pemerintahan. Tingkat kinerja Sekretariat DPRD Bagian*

umum dan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian kinerja keseluruhan organisasi tersebut di Kabupaten Lahat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menjelaskan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. **Metode:** Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data berasal dari individu, dokumen, dan tempat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup baik berdasarkan Teori Dwiyanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja termasuk Sumber Daya Manusia, motivasi kerja, dan sarana prasarana. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan kinerja termasuk mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dapat menunjang kinerja, membenahi sarana, mewajibkan pegawai mengikuti apel pagi, memberikan motivasi secara aktif, dan memberikan reward serta punishment.

**Kata Kunci:** Organisasi, Kinerja,

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010, yang dikenal sebagai "Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025," menargetkan agar struktur pemerintahan mencapai kualitas tata kelola yang optimal. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membentuk birokrasi yang profesional, jujur, serta berperan sebagai pelayan masyarakat dan pengabdian negara. Dalam konteks pemerintahan, prestasi suatu organisasi diukur melalui sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di dalam organisasi pemerintahan, khususnya, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran kunci dalam memberikan kinerja optimal guna mencapai tujuan tersebut. Kerjasama yang baik antara SDM dianggap sebagai elemen penting dalam pencapaian target kinerja yang diharapkan (NOYA et al., 2021).

Suatu organisasi dinilai berhasil apabila mampu mencapai kinerja yang diinginkan. Kinerja organisasi pemerintahan menjadi fokus utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh beberapa organisasi pemerintahan dalam mencapai target kinerja mereka. Contoh nyata terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat, di mana prestasi atau kegagalan kinerja Sekretariat DPRD memiliki dampak signifikan pada pencapaian kinerja keseluruhan organisasi. Keberhasilan inisiatif peningkatan kinerja pegawai baik pada tingkat individu, tim, maupun organisasi sangat berkorelasi dengan kualitas pengelolaan SDM. SDM di sini merujuk kepada individu yang bekerja dengan dedikasi dan memiliki wewenang serta keterampilan

untuk menjalankan aktivitas organisasi yang memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan hasil yang diinginkan (Novriansya et al., 2022).

Pada era pembangunan nasional seperti saat ini, keberhasilan suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta, diukur berdasarkan sejauh mana tujuan organisasi tersebut tercapai. Banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, faktor penentu keberhasilan organisasi pemerintahan adalah pegawai di bagian-bagian organisasi yang paling efektif. Tolak ukur kinerja organisasi dapat diketahui dengan mengukur kinerja unit-unit organisasi. Dengan melakukan pengukuran ini, kita dapat mengetahui tingkat kinerja pegawai dalam organisasi tersebut. Adanya kegiatan yang memberikan umpan balik atas hasil pengukuran kinerja dapat mendorong evaluasi kinerja sehingga menghasilkan kinerja organisasi yang berkualitas tinggi dan kompetitif. Organisasi yang baik adalah yang berhasil mewujudkan prestasi. Namun, saat ini kinerja organisasi pemerintahan di Indonesia masih memprihatinkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kinerja organisasi di kalangan pejabat masih rendah, terutama dalam organisasi pemerintahan seperti DPRD, di mana baik buruknya kinerja sangat mempengaruhi pencapaian organisasi (Pratiwi, 2019).

DPRD adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan, mengalokasikan dana, dan mengawasi berbagai hal. Meskipun tugas DPRD dimaksudkan sebagai cerminan normatif kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mekanisme checks and balances, tantangan tetap ada. Sekretariat DPRD dibentuk untuk membantu berfungsinya DPRD. Menurut UU No 9 Tahun 2015, Sekretariat DPRD bertugas melaksanakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung terlaksananya tugas serta fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan staf ahli yang dibutuhkan DPRD. Sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD adalah unsur penyelenggara pelayanan dan penunjang tugas serta fungsi DPRD kabupaten/kota. Agar DPRD Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dapat menjalankan berbagai tanggung jawabnya secara efektif, hubungan kerja antara Sekretaris DPRD dan anggota DPRD harus terjalin dengan baik. Hal ini menjadi kendala besar bagi Sekretariat DPRD dalam upaya membantu DPRD Kabupaten Lahat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan (Siregar et al., 2023).

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat merupakan jabatan tertinggi daerah dalam pemerintahan, atau jabatan II.B. Setiap pimpinan, departemen, dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin terlaksananya prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi saat melaksanakan tugasnya, baik internal maupun eksternal, dengan instansi lain sebagaimana mestinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga yang disertai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat memainkan peranan yang menonjol dalam memenuhi kebutuhan DPRD serta tuntutan lingkungan administrasi publik dan politik, yang menunjukkan posisi strategis DPRD di daerah (Yurisca et al., 2019).

Salah satu prinsip yang fundamental dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan amanah atau mandat yang diberikan kepada suatu lembaga. Dengan dasar pemikiran ini, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat (LKJIP) Tahun 2022 telah disusun. LKJIP ini

memaparkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat selama tahun 2022, yang merupakan tanggung jawab yang diemban oleh organisasi. Selain itu, LKJIP juga dianggap sebagai kebutuhan esensial untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja guna meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan. LKJIP Tahun 2022 ini mencakup berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga DPRD, tidak hanya mencerminkan pencapaian positif lembaga pemerintahan, tetapi juga melibatkan dukungan dari sektor bisnis dan partisipasi masyarakat secara umum (Wangkasa & Anisykurlillah, 2023).

Sehubungan dengan itu, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung terhadap prosedur dan tata kerja alat kelengkapan DPRD perlu memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian. Dukungan tersebut perlu diaplikasikan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang memerlukan waktu 20 tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang memerlukan waktu 5 tahun, serta RKPD/RENJA (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan/Rencana Kerja SKPD) untuk 1 tahun yang sejalan dengan visi, misi, RPJPD, dan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat. Bagian umum di Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi administratif dan mendukung kelancaran operasional DPRD. Tugasnya meliputi manajemen kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, keamanan, serta berbagai aspek administratif lainnya. Sementara bagian keuangan bertanggung jawab atas manajemen keuangan DPRD, mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pengawasan terhadap pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks DPRD, kedua bagian ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa aspek administratif dan keuangan berjalan efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Penelitian ini berfokus pada kesenjangan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya kompetensi dan kualifikasi SDM yang ada. Data dari LAKIP 2022 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai masih berpendidikan SLTA, dengan hanya sedikit yang memiliki kualifikasi S-2 atau S-1. Kesenjangan ini menciptakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan manajemen di Sekretariat DPRD. Pegawai yang kurang terampil dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai sering kali kesulitan dalam mengadaptasi prosedur baru dan teknologi, yang berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

Selain masalah kualifikasi, penelitian ini juga menyoroiti masalah jumlah SDM yang terbatas dan kurangnya tenaga kerja yang berpengalaman. Banyak pegawai yang sudah berusia tua atau tidak memiliki kemampuan yang relevan dengan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tidak merata dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Kesenjangan antara kebutuhan organisasi dan kapasitas pegawai ini menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi internal menunjukkan bahwa tanpa peningkatan dalam jumlah dan kualitas SDM, Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat akan terus mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi adanya kurangnya dukungan teknis dan administratif dari Sekretariat DPRD kepada DPRD Kabupaten Lahat. Hal ini mencakup dukungan dalam bentuk

pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Tanpa adanya dukungan yang memadai, anggota DPRD tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi dengan efektif. Kesenjangan dalam dukungan ini memperlihatkan bahwa Sekretariat DPRD belum sepenuhnya berfungsi sebagai supporting system yang diharapkan dalam RPJPD dan RPJMD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan strategi dan solusi yang dapat mengatasi kesenjangan tersebut, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

#### **Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Sumiati Harahap dan R. H. Isnaini dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Strukturasi (2021), mengkaji penyelenggaraan administrasi di bagian umum pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provsu berhasil menyusun target kegiatan dengan memperhitungkan setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh DPRD. Selain itu, pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan partisipasi, telah membantu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan seperti kurangnya kompetensi kerja pegawai dan koordinasi yang tidak efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penulis menyarankan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, serta peningkatan tanggung jawab dan kedisiplinan pegawai (Sumiati et al., 2021).

#### **Kinerja Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba**

Penelitian oleh M. N. Agustang dan A. Annas, yang dipublikasikan di Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (2022), bertujuan untuk mengukur kinerja layanan sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik non-probability sampling, penelitian ini melibatkan 30 responden dari anggota DPRD periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja layanan sekretariat secara keseluruhan dinilai kurang baik, dengan skor 73,62. Layanan bagian umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan, serta fasilitas penganggaran dan pengawasan semuanya menunjukkan hasil yang serupa dengan mutu layanan yang dinilai kurang baik. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam berbagai aspek layanan sekretariat untuk meningkatkan kinerja keseluruhan (M et al., 2022).

#### **Pelaksanaan Kerja Sub Bagian Program Dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas**

Herlina H. dan Radarmas R. dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal NYULI (2021), mengevaluasi pelaksanaan kerja Sub Bagian Program dan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait di Sekretariat DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja di Subbagian Program dan Keuangan berjalan sesuai dengan tugas dan

fungsi yang ditetapkan, namun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan kurangnya koordinasi antar bagian. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan dan kerjasama antar pegawai untuk meningkatkan kinerja (Herlina & Radarmas, 2021).

### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dalam Mendukung Fungsi DPRD Kota Batu**

Penelitian oleh Dike Mukin A. P. dan Hartono Y., dipublikasikan di *Journal of Public & Business Administration Science* (2022), menganalisis tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Batu. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung fungsi DPRD. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan kurangnya sarana prasarana. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung kinerja DPRD (Dike Mukin & Hartono, 2022).

### **Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

Rahmawati, N., Made, A., dan Yogivaria, D. dalam penelitian yang dipublikasikan di *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama* (2016), mengevaluasi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi berbasis akrual, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Penelitian ini menyarankan perlunya pelatihan lebih lanjut dan peningkatan pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi berbasis akrual (Rahmawati et al., 2016).

### **Kinerja Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam Proses Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung**

Penelitian oleh Nurhadiansyah, N. dan Nelson, N. yang dipublikasikan di *Jurnal Sosial dan Humanis Sains* (2019), mengevaluasi kinerja pembantu bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa proses penerbitan Surat Penyediaan Dana dan pertanggungjawaban keuangan seringkali mengalami keterlambatan akibat dokumen kontrak yang tidak lengkap dan kurangnya koordinasi antara pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sistem koordinasi dan pemenuhan dokumen administrasi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan (Nurhadiansyah & Nelson, 2019).

### **Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman**

Wahyudi, D. dan Mulyono, H. dalam penelitiannya yang dipublikasikan di *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (2020), menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan efektif, terutama dalam tahap

pelaksanaan APBD. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam memahami aspek teknis anggaran serta kurangnya transparansi dalam proses pengawasan. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan peningkatan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD (Rahayu & Wikaningtyas, 2021).

### **Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Fungsi Legislasi DPRD Kota Surabaya**

Penelitian oleh Yulianti, S. dan Prasetyo, W. yang dipublikasikan di Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (2019), mengevaluasi peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi DPRD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah berperan signifikan dalam mendukung fungsi legislasi melalui penyediaan dukungan administrasi dan teknis. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan fasilitas yang memadai. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas pegawai dan perbaikan fasilitas untuk mendukung kinerja legislasi DPRD (Yuliyanti, 2018).

### **Analisis Efektivitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik**

Penelitian oleh Subagyo, S. dan Kurniawan, D. yang dipublikasikan di Jurnal Administrasi Publik (2018), menganalisis efektivitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini melibatkan 50 responden dari anggota DPRD dan pegawai Sekretariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Sekretariat DPRD masih kurang optimal, dengan beberapa aspek pelayanan yang dinilai kurang memuaskan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang tidak memadai. Penelitian ini menyarankan perbaikan dalam aspek manajemen sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas pelayanan (Budung et al., 2022).

### **Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi**

Penelitian oleh Susanti, R. dan Hermawan, A. yang dipublikasikan di Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik (2020), mengevaluasi pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi. Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepemimpinan yang baik dan motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan dan motivasi kerja melalui program pelatihan dan pengembangan pegawai (Utami & Hamid, 2021).

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam menganalisis kinerja Sekretariat DPRD Bagian Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam dibandingkan

dengan sepuluh penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sumiati Harahap et al. di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan M.N. Agustang et al. di Kabupaten Bulukumba, hanya berfokus pada analisis deskriptif dan evaluasi kinerja berdasarkan metode kuantitatif sederhana. Sementara itu, penelitian di Kabupaten Lahat ini menggunakan pendekatan metodologis yang lebih holistik dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja administrasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan analisis kebijakan dan regulasi terbaru yang relevan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Lebih lanjut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap peran dan efisiensi Bagian Umum dan Keuangan dalam mendukung fungsi DPRD dalam konteks pemerintahan daerah. Sebelumnya, penelitian oleh Herlina H. di Kabupaten Gunung Mas dan Dike Mukin A.P. di Kota Batu lebih banyak membahas tentang tugas pokok dan fungsi sub bagian tertentu tanpa menyelidiki interkoneksi dan sinergi antarbagian dalam menjalankan administrasi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana koordinasi dan kolaborasi antarbagian di Sekretariat DPRD dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang ada dengan mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam sistem administrasi serta menawarkan rekomendasi yang lebih konkret untuk perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek-aspek modernisasi administrasi publik, seperti implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, yang merupakan topik yang kurang diperhatikan dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurhadiansyah N. di Provinsi Lampung dan Rahmawati N. di Kabupaten Malang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah penelitian yang ada, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai kinerja Sekretariat DPRD dalam konteks yang lebih dinamis dan modern.

## **1.5 Tujuan**

Untuk mencapai maksud dari latar belakang di atas, peneliti harus mencari banyak informasi guna mencapai tujuan serta mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis beberapa hal penting. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat kinerja Sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, serta strategi-strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.

## **II. METODE**

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk eksplorasi dan analisis terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk menggambarkan fenomena yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti dinamika internal dan interaksi sosial di dalam organisasi (Murdiyanto, 2020). Penelitian ini akan memfokuskan pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pegawai Sekretariat DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat yang terlibat langsung dengan pelayanan dan keuangan di Sekretariat tersebut. Data akan dianalisis secara induktif, dimulai dengan observasi dan eksplorasi fenomena, untuk kemudian diinterpretasikan guna merumuskan deskripsi yang mendalam mengenai kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (L.J Moleong, 2022).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mencakup penggunaan teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto sebagai kerangka teoretis. Konsep ini meliputi dimensi-dimensi kinerja seperti efisiensi, efektivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, yang akan dioperasionalkan melalui pengumpulan data primer dari responden yang relevan (Rijali, 2019). Data sekunder dari dokumen-dokumen terkait juga akan digunakan untuk mendukung analisis. Penelitian ini memilih metode purposive sampling untuk memilih informan berdasarkan kebutuhan spesifik penelitian, memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan relevan dengan tujuan penelitian secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat (Hasibuan et al., 2022).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penilaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan**

Penilaian kinerja merupakan hal yang krusial dalam mengevaluasi efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, evaluasi ini penting untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

##### **Produktivitas**

Dalam penelitian ini, fokus penulis adalah pada dimensi produktivitas. Produktivitas diukur melalui dua indikator utama: efisiensi biaya dan waktu pelayanan, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan inventaris. Tabel progres kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar layanan kegiatan dan kesejahteraan DPRD telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, masih ada beberapa aspek yang belum mencapai target optimal, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

##### **Tingkat Efisiensi**

Efisiensi dalam pengelolaan biaya dan waktu pelayanan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Biaya pelayanan harus transparan dan tidak diskriminatif, terutama dalam konteks pelayanan publik

oleh Sekretariat DPRD. Hasil wawancara dengan anggota DPRD menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak memerlukan biaya tambahan, yang menandakan efisiensi pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat.

### **Biaya Pelayanan**

Biaya pelayanan yang transparan adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Sekretariat DPRD. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota DPRD, tidak ada biaya tambahan yang diminta untuk layanan yang diberikan, seperti transportasi dan makanan selama perjalanan dinas. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan.

### **Waktu Pelayanan**

Kecepatan dalam pelayanan juga menjadi aspek yang dinilai. Berdasarkan observasi, waktu pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat sudah memenuhi standar yang diperlukan. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam responsifitas terhadap kebutuhan fasilitas anggota DPRD, yang menunjukkan perluasan sumber daya manusia yang lebih andal dan tanggap.

### **Tingkat Efektivitas**

Efektivitas pengelolaan keuangan dan inventaris menjadi indikator penting dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD. Meskipun terdapat beberapa fasilitas yang masih diperlukan, seperti mesin fotokopi dan genset, pengelolaan yang efektif tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi.

### **Sarana Prasarana**

Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kinerja optimal suatu organisasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat saat ini menghadapi tantangan dalam pengadaan fasilitas yang diperlukan karena keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk memenuhi standar layanan publik yang memadai, sejalan dengan regulasi yang berlaku.

## **3.2 Kualitas Layanan di Sekretariat DPRD Bagian Umum dan Keuangan Kabupaten Lahat**

Dalam upaya untuk mengukur kinerja sebuah organisasi, salah satu aspek yang menjadi fokus adalah kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Penelitian ini menggunakan tingkat kepuasan publik sebagai indikator tunggal yang terbagi menjadi empat sub-indikator utama, yaitu keandalan, responsifitas, jaminan, dan empati.

### **Tingkat Kepuasan Publik**

Tingkat kepuasan publik merupakan hasil dari penilaian terhadap empat sub-indikator tersebut, yang mencerminkan sejauh mana kebutuhan publik terpenuhi oleh layanan yang diberikan. Dalam konteks Sekretariat DPRD Bagian Umum dan Keuangan Kabupaten Lahat, tingkat kepuasan ini

sangat relevan karena menunjukkan seberapa baik layanan yang mereka berikan kepada anggota DPRD dan masyarakat umum.

### **Kendala**

Keandalan Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah organisasi memainkan peran krusial dalam mencapai kinerja yang optimal. Di Sekretariat DPRD, keberadaan SDM yang dapat diandalkan menjadi faktor penentu dalam efektivitas pelayanan. Meskipun terdapat pegawai negeri dan honorer yang berperan, tantangan utama terletak pada beragamnya karakteristik anggota DPRD yang memerlukan pelayanan dengan tingkat kepuasan yang bervariasi.

### **Analisis Kepuasan Publik dari Perspektif Ketua DPRD**

Menurut hasil wawancara dengan Ketua DPRD, Bapak Fitrizal Homizi, ST, M.SI, Sekretariat DPRD telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, masih ada kelemahan yang teridentifikasi, seperti jumlah anggota DPRD yang besar yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelayanan yang bersifat personal dan responsif.

### **Tantangan dalam Penanganan Surat-Menyurat**

Kualitas penanganan surat-menyurat di Sekretariat DPRD menjadi perhatian utama, terutama dalam pembuatan notulen rapat. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Astopi Zaki, S.IP., M.SI, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman dan pelaksanaan standar operasional untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan notulen rapat. Hal ini berpotensi menurunkan kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan.

### **Perspektif Wansyah SP tentang Kesiapan Pegawai**

Wansyah SP mengamati bahwa sementara layanan yang diberikan sudah cukup baik, tidak semua pegawai di Sekretariat DPRD dapat diandalkan sepenuhnya dalam menjalankan tugas mereka. Kurangnya pemahaman terhadap tugas-tugas spesifik dan kebutuhan anggota DPRD menjadi faktor penghambat dalam mencapai kualitas layanan yang konsisten.

### **Tantangan Keandalan Sumber Daya Manusia**

Hasil interaksi dengan beberapa informan menunjukkan bahwa keandalan Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat masih perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan pelatihan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat menjalankan tugas mereka dengan akurat dan efisien, terutama dalam konteks penyusunan notulen rapat dan penanganan administrasi lainnya.

### **Ketanggapan sebagai Indikator Kualitas Layanan**

Ketanggapan dalam memberikan pelayanan merupakan aspek yang krusial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD, tingkat ketanggapan yang tinggi menandakan bahwa organisasi tersebut mampu merespons kebutuhan anggota DPRD dengan cepat dan efektif.

## **Upaya Meningkatkan Jaminan Layanan**

Jaminan layanan menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD. Dalam interaksi dengan Ketua DPRD, terlihat bahwa upaya untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap kualitas pelayanan telah dilakukan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

## **Sikap Empati dalam Meningkatkan Kualitas Layanan**

Empati sebagai sub-indikator kualitas layanan juga menjadi fokus penting. Hasil wawancara dengan Sekertaris DPRD menunjukkan bahwa adopsi sikap empati dalam memberikan layanan telah diterapkan, yang memberikan dampak positif terhadap persepsi anggota DPRD terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat.

### **3.3 Faktor yang Mempengaruhi kinerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Lahat**

Untuk memaksimalkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, beberapa faktor kunci perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat terdiri dari 105 pegawai pada tahun 2023, dengan mayoritas pegawai non-PNS (64 orang) hanya lulusan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pegawai mungkin tidak selalu sesuai dengan kompetensi mereka, sebagaimana disarankan oleh Simanjuntak dalam Widodo (2015), bahwa pendidikan dan pelatihan karyawan memengaruhi kinerja organisasi. Ketidaktepatan penempatan pegawai dapat menghambat efisiensi dan produktivitas.

Pendidikan dan latihan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM di Sekretariat DPRD. Misalnya, pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis atau hukum dapat ditempatkan sesuai dengan bidang kompetensi mereka seperti Dinas Pertanian atau Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan kontribusi mereka. Penempatan yang tepat tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga efisiensi organisasi secara keseluruhan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, Motivasi Kerja juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja. Motivasi yang kuat dari pimpinan dan lingkungan kerja yang mendukung dapat mendorong pegawai untuk memberikan usaha lebih dan hasil yang lebih baik. Hal ini tidak hanya mencakup motivasi finansial, tetapi juga pengakuan atas kontribusi mereka, kesempatan untuk pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Pegawai yang termotivasi cenderung lebih fokus dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas operasional Sekretariat DPRD.

Responsivitas organisasi terhadap tugas-tugasnya juga bergantung pada SDM yang berkualitas. Pegawai yang mampu merespons tantangan dan tugas dengan cepat dan efisien akan memastikan bahwa misi dan tujuan organisasi tercapai dengan baik. Ketersediaan SDM yang terlatih dengan baik

juga mempengaruhi waktu pelayanan dan manajemen keuangan, yang penting untuk menjaga efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan anggaran yang transparan.

Secara keseluruhan, pengelolaan SDM yang baik dan motivasi kerja yang tinggi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pemahaman yang baik tentang potensi dan kebutuhan SDM, serta penempatan yang tepat berdasarkan kompetensi, akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Ini bukan hanya tentang meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

### **3.4 Upaya dalam Meningkatkan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat**

Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan kontribusi mereka dalam mendukung fungsi DPRD secara keseluruhan.

Pertama, peningkatan kompetensi pegawai menjadi prioritas utama. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang terfokus pada administrasi keuangan, manajemen keuangan publik, dan penerapan teknologi informasi terbaru akan sangat mendukung efisiensi kerja. Dalam konteks Sekretariat DPRD, di mana keahlian administrasi dan manajerial sangat penting, peningkatan kompetensi akan membantu staf dalam menangani tugas-tugas mereka dengan lebih baik. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan dan kebijakan terkait administrasi publik dan pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dengan memperkuat kemampuan dalam manajemen keuangan, staf dapat lebih cermat dalam penganggaran dan pengawasan anggaran, yang merupakan bagian kunci dari tugas mereka.

Langkah kedua adalah implementasi sistem penghargaan dan hukuman yang jelas. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada staf yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak memenuhi standar kinerja. Penghargaan dapat berupa pengakuan atas kontribusi yang signifikan, promosi, atau insentif finansial, sementara sanksi harus sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Dengan menerapkan sistem ini, motivasi kerja diharapkan meningkat karena staf merasa dihargai dan adil dalam penilaian kinerja mereka. Akuntabilitas juga ditingkatkan, karena staf memahami bahwa ada konsekuensi nyata atas kinerja mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen modern yang mendorong keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab di tempat kerja.

Langkah ketiga adalah evaluasi dan pemantauan berkala terhadap kinerja Sekretariat DPRD Bagian Umum dan Keuangan. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa perbaikan yang diperlukan dapat diimplementasikan dengan tepat waktu. Pemantauan berkala ini melibatkan analisis terhadap pencapaian tujuan-tujuan strategis dan operasional sekretariat. Misalnya, apakah sistem baru telah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan? Apakah ada area administratif yang masih membutuhkan peningkatan dalam penerapan teknologi informasi? Dengan mengevaluasi secara berkala, manajemen dapat mengambil langkah-

langkah korektif atau perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kinerja sekretariat terus meningkat.

Secara keseluruhan, implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat. Dengan meningkatkan kompetensi staf, menerapkan sistem penghargaan dan hukuman yang adil, serta melakukan evaluasi berkala, sekretariat dapat berperan lebih efektif dalam mendukung tugas-tugas DPRD. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili dan melayani kepentingan masyarakat dengan lebih baik.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian ini mengkaji kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada Bagian Umum dan Keuangan. Penelitian ini mengungkap beberapa aspek kunci kinerja, termasuk produktivitas, efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan. Untuk memahami lebih dalam hasil penelitian ini, penting untuk membandingkan dengan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan.

#### **Produktivitas dan Efisiensi**

Penelitian ini menyoroti bahwa produktivitas diukur melalui efisiensi biaya dan waktu pelayanan, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan inventaris. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar layanan DPRD telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Dalam konteks efisiensi biaya, penelitian ini menemukan bahwa biaya pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat transparan dan tidak diskriminatif, dengan tidak adanya biaya tambahan yang diminta untuk layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumiati Harahap dan R. H. Isnaini (2021) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam meningkatkan kinerja.

Namun, penelitian ini juga menemukan kekurangan dalam responsifitas terhadap kebutuhan fasilitas anggota DPRD. Kekurangan ini menunjukkan perlunya pengembangan sumber daya manusia yang lebih andal dan tanggap. Temuan ini sejalan dengan penelitian Herlina H. dan Radarmas R. (2021) di Kabupaten Gunung Mas, yang juga mencatat keterbatasan sumber daya aparatur dan koordinasi yang tidak efektif sebagai hambatan utama.

#### **Kualitas Layanan**

Kualitas layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat dinilai melalui tingkat kepuasan publik yang mencakup keandalan, responsifitas, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, masih terdapat kelemahan dalam penanganan surat-menyurat dan kesiapan pegawai. Hal ini konsisten dengan penelitian M. N. Agustang dan A. Annas (2022) di Kabupaten Bulukumba, yang menemukan bahwa kinerja layanan sekretariat secara keseluruhan dinilai kurang baik.

Kendala dalam kualitas layanan juga ditemukan pada kurangnya keandalan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap tugas-tugas spesifik. Penelitian oleh Dike Mukin A. P. dan Hartono Y. (2022) di Kota Batu juga mencatat pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung kinerja yang lebih baik.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Penelitian ini mengidentifikasi sumber daya manusia dan motivasi kerja sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pendidikan dan pelatihan yang tepat diakui sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas SDM, sejalan dengan rekomendasi Simanjuntak dalam Widodo (2015). Penempatan pegawai sesuai kompetensi mereka juga dianggap krusial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanti, R. dan Hermawan, A. (2020) di Kabupaten Banyuwangi, yang menemukan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

### **Upaya Meningkatkan Kinerja**

Penelitian ini mengusulkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat, termasuk peningkatan kompetensi pegawai, implementasi sistem penghargaan dan hukuman yang jelas, serta evaluasi dan pemantauan berkala. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan kontribusi dalam mendukung fungsi DPRD. Penelitian oleh Yulianti, S. dan Prasetyo, W. (2019) di Kota Surabaya juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pegawai dan perbaikan fasilitas untuk mendukung kinerja legislatif.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik**

Diskusi mengenai temuan menarik dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek kunci yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah signifikansi dari peningkatan kompetensi pegawai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan administrasi keuangan, manajemen keuangan publik, dan teknologi informasi mampu secara substansial meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan yang diberikan oleh staf DPRD.

Selanjutnya, implementasi sistem penghargaan dan sanksi juga memperlihatkan dampak yang positif dalam meningkatkan motivasi dan akuntabilitas staf. Ketika ada insentif yang jelas untuk kinerja tinggi dan konsekuensi yang nyata atas kinerja yang kurang memuaskan, staf cenderung lebih terdorong untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.

Pemantauan dan evaluasi yang rutin juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perbaikan-perbaikan yang diimplementasikan memberikan dampak yang diharapkan. Dengan mengidentifikasi secara cepat area-area yang perlu diperbaiki, manajemen dapat lebih responsif dalam meningkatkan efektivitas operasional dan mendukung tujuan-tujuan strategis DPRD.

Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya manajemen sumber daya manusia yang efektif dan pengelolaan kinerja yang terukur dalam mendukung fungsi lembaga legislatif seperti

DPRD. Langkah-langkah ini bukan hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kontribusi DPRD dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat di Kabupaten Lahat.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja Sekretariat DPRD Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat, berdasarkan Teori Dwiyanto, dinilai sudah cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja termasuk sumber daya manusia, motivasi kerja, dan sarana prasarana. Untuk meningkatkan kinerja, Sekretariat DPRD telah melakukan upaya seperti mengusulkan pelatihan bagi pegawai, memperbaiki sarana, mewajibkan kehadiran pada apel pagi, serta memberikan motivasi langsung dari pimpinan kepada pegawai beserta sistem reward dan punishment yang jelas.

Adapun saran yang dapat diberikan meliputi perlunya peningkatan pengembangan kompetensi pegawai melalui bimtek, sosialisasi, dan pelatihan kepegawaian untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Diperlukan juga penerapan sistem penempatan pegawai berdasarkan kompetensi untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan tugasnya dengan efektif sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman. Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana yang lebih baik sangat diperlukan agar dapat mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan operasional yang terus berkembang. Terakhir, transparansi dalam masalah keuangan dan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terjaga dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan penelitian ini termasuk dalam cakupan dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini terbatas pada analisis kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga generalisasi hasil ke situasi yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Metode penelitian yang digunakan mungkin tidak mencakup seluruh variabel yang berpotensi memengaruhi kinerja Sekretariat DPRD secara komprehensif, seperti faktor-faktor eksternal atau dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi kinerja administratif. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam jumlah responden atau data yang tersedia, yang dapat membatasi kedalaman analisis atau representasi keseluruhan kondisi Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian memberikan wawasan yang berharga, pembaca disarankan untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik unik dari Kabupaten Lahat ketika menafsirkan implikasi penelitian ini untuk situasi yang serupa di tempat lain.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk mengembangkan penelitian ini di masa depan, perlu dilakukan beberapa langkah tambahan. Pertama, penting untuk meluaskan cakupan penelitian dengan memasukkan variabel-variabel eksternal seperti faktor politik lokal dan dinamika sosial yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bagian Umum dan Keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas operasional DPRD. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas metodologi dengan

menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam, seperti wawancara mendalam dengan stakeholders kunci atau observasi langsung, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika internal DPRD. Selanjutnya, fokus juga dapat diperluas untuk membandingkan kinerja DPRD di kabupaten lain atau dengan unit-unit sejenis di provinsi lain, sehingga dapat dieksplorasi perbedaan dalam praktik dan strategi yang mungkin berkontribusi pada kinerja yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja administratif DPRD serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dan relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional DPRD secara keseluruhan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budung, A., Mas'ud, M., & Hamzah, M. (2022). PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2). <https://doi.org/10.37476/jbk.v11i2.3090>
- Dike Mukin, A. P., & Hartono, Y. (2022). TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Analisa Studi Pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Guna Mendukung Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Ja. *AKSES : JOURNAL OF PUBLIK & BUSINESS ADMINISTRATION SCIENCE*, 4(1). <https://doi.org/10.58535/jasm.v4i1.25>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Herlina, H., & Radarmas, R. (2021). Pelaksanaan Kerja Sub Bagian Program Dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas. *NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial Dan Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.56426/nyuli.v2i2.87>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- M, N., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Annas, A. (2022). Kinerja Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2744>

- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Novriansya, D., Idayati, I., Riance, A., & Suwarno. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jebmak*, 1(1).
- NOYA, A. W., TULUSAN, F. M. G., & TAMPONGANGOY, D. L. (2021). KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA. *JAP (Jurnal Administrasi Publik)*, VII(102).
- Nurhadiansyah, N., & Nelson, N. (2019). KINERJA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PROSES PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS*, 4(2). <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i2.559>
- Pratiwi, N. J. (2019). Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1).
- Rahayu, RR. Y. P. W., & Wikaningtyas, S. U. (2021). KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i2.390>
- Rahmawati, N., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1).
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Siregar, D. O., Simanjorang, E. F. S., & Prayoga, Y. (2023). Penyelenggaraan Administrasi Dalam Mendukung Good Governance. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4). <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.307>
- Sumiati, Harahap, R. H., & Isnaini. (2021). Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1).
- Utami, D. R., & Hamid, M. S. (2021). ANALISIS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i2.388>
- Wangkasa, N. B. D., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Aplikasi Sippol Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 13(2). <https://doi.org/10.33592/jjia.v13i2.4282>
- Yuliyanti. (2018). HUBUNGAN KOMPETENSI DENGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN KEUANGAN BIRO UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *EJournal Administrasi Negara*, 6(1).
- Yurisca, M., Haninun, H., & Dunan, H. (2019). Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan Pengawasan Fungsional dengan Akuntabilitas Keuangan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran. *VISIONIST*, 8(2). <https://doi.org/10.36448/jmv.v8i2.1694>